Tinjauan Hukum terhadap Peran Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa

Sri Poniyah*, Ramlani Lina Sinaulan**, Farhana***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ARTICLE INFO

Keywords:

Commitment making official
Corruption
Criminal liability
Legal protection
Procurement of goods and services

Corresponding Author:

Sri.poniyah@gmail.com

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas

Volume 17 Nomor 2

Juli 2023 – Desember 2023

P-ISSN: 1411-8564

E-ISSN: 2502-5511

hh. 40 – 46

Received date: 20/09/2023

Published date: 15/10/2023

ABSTRACT

Corruption in the procurement of goods and services is a serious concern in many countries, including Indonesia. In this context, the role of the Commitment Making Officer (PPK) has a significant impact on the integrity and transparency of the procurement process. This research provides a legal review of the role of PPK in corruption crimes in the procurement of goods and services in Indonesia. The method used in this research is the normative juridical approach method. The approaches used in this type of normative research are statutory approaches and conceptual approaches. Types and sources of data used as research materials primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study found that Presidential Regulation No. 12 of 2021 authorizes PPK by prohibiting the practice of bribery, but the limits of PPK's authority are regulated by Article 52 Paragraph (2) and LKPP Circular Letter No. 8 of 2020. PPK's responsibilities include aspects of administrative and civil law, with the core of criminal liability focused on procurement law violations involving abuse of authority for personal or collective gain, harming the state. PPK's criminal liability involves individual fault, subjective fault, and the role of other parties in the procurement, including the Budget User (PA) and the Budget User Authority (KPA).

Kejahatan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan transparansi proses pengadaan. Penelitian ini memberikan tinjauan hukum terhadap peran PPK dalam kejahatan korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yang dijadikan bahan penelitian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian menemukan bahwa Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 memberikan wewenang kepada PPK dengan melarang praktik suap, tetapi batasan kewenangan PPK diatur oleh Pasal 52 Ayat (2) dan Surat Edaran LKPP No. 8 Tahun 2020. Tanggung jawab PPK meliputi aspek hukum administrasi dan perdata, dengan inti pertanggungjawaban pidana terfokus pada pelanggaran hukum pengadaan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kolektif, merugikan negara. Pertanggungjawaban pidana PPK melibatkan kesalahan individu, kesalahan subjektif, dan peran pihak lain dalam pengadaan, termasuk Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

©2023 JPHL. All rights reserved

PENDAHULUAN

Banyaknya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terjadi akibat tindakan pejabat pengadaan yang menyalahgunakan kewenangannya. Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana suap. Dari

segi pertanggungjawaban, sebenarnya pertanggungjawaban atas penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan, mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, nampak terlihat bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak hanya PPK yang terlibat, tetapi terdapat pihak-pihak lainnya yang turut mengambil peran dalam pengadaan barang dan jasa yang saling terkait satu sama lain, diantaranya adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dimana PA memiliki tugas dan kewenangan dalam menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan sedangkan KPA memiliki kewenangan sesuai dengan apa yang dilimpahkan oleh PA mengenai pengadaan (Istiqlallia, et al. 2020).

Bentuk penyimpangan terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa, juga telah dikemukakan oleh *Indonesian Corruption Watch* yang dirangkum dalam Sepuluh Besar Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor Tahun 2020, bahwa aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi adalah ASN, Swasta dan Kepala Desa dengan kasus korupsi yang melibatkan unsur ASN dan swasta terjadi pada saat proses pengadaan barang dan jasa (Alamsyah, 2020). Dalam hal ini, tentu PPK sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara yang ditunjuk oleh KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan KPA salah satunya adalah menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan pelaksanaan kontrak baik dengan Penyedia Barang dan Jasa maupun Swakelola. Artinya PPK memiliki pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan barang dan jasa, jika terjadinya penyimpangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berujung pada korupsi dimungkinkan jika pengadaan barang dan jasa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dari pengadaan barang dapat terjadi, potensi tersebut dapat terjadi baik dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya:

1. Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Suap (Pasal 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13);
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10);
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g);
5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);
6. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf j; dan
7. Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C).

Dalam hal ini, PPK sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara yang memegang peranan sangat krusial di Satuan Kerja. Khususnya dalam pengadaan barang/ jasa, PPK mempunyai peran yang sangat penting. Mengingat peran PPK yang krusial, penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pelaku pengadaan Barang dan Jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan. Sehingga PPK, dalam proses pengadaan Barang dan Jasa mempunyai risiko yang besar, khususnya terkait dengan

permasalahan hukum. Jika melihat dari sisi hukum, bahwa risiko yang dihadapkan bagi pelaku dalam pengadaan barang dan jasa sangat tinggi. Pejabat pengadaan kemungkinan akan dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum, baik bertindak sebagai saksi, atau diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Perbuatan atau pembiaran yang disengaja yang mengakibatkan kerugian Negara tentunya PPK akan dihadapkan pada pertanggungjawabannya. Hal ini dikarenakan PPK sebagai pelaksana dan sekaligus pengguna anggaran negara, bertanggung jawab atas semua jumlah rupiah yang dikeluarkan sehubungan dengan penggunaan anggaran negara dan menimbulkan banyak risiko. Dalam siklus anggaran, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan peran dari PPK. Karena penting dan luasnya cakupan kerja maka PPK seharusnya dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Sehingga PPK dalam melaksanakan tugasnya, harus mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan keuangan APBN, Perbendaharaan Negara, sampai dengan ketentuan yang mengatur teknis operasional. Adapun ketentuan-ketentuan yang perlu dipahami oleh seorang PPK yaitu antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2017 tentang Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang dan Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Apabila meninjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya di lapangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa dilimpahkan sepenuhnya terhadap PPK, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, PPK akan menghadapi konsekuensi pertanggungjawaban hukum, antara lain hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengadaan Barang dan Jasa pemerintah mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proses pengadaan. Hal inilah yang akan menjadi kesempatan dalam penyalahgunaan keuangan negara merupakan perbuatan melawan hukum yang menjadi salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sehingga berimplikasi pada kerugian keuangan negara.

Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atas perbuatannya yang melanggar hukum. Ini melibatkan tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dalam konteks hukum, "tanggung jawab" dapat merujuk pada "*responsibility*" (bahasa Inggris) atau "*verantwoordelijk*" (bahasa Belanda). Sehingga pertanggungjawaban pidana mencakup tanggung jawab sebagai 'fungsi menerima beban, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain (KBBI, 2016).'

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat pemerintahan memiliki tanggung jawab hukum atas administrasi pemerintahan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara terkait pengadaan (Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). PPK memiliki wewenang yang ditetapkan oleh PA/KPA, (Pasal 9 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.) dan tanggung jawab utama tetap pada PA/KPA (Metasari, 2022). PPK harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 11 ayat (1) huruf i, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah),

menerapkan prinsip efisien, efektif, dan transparan (Hadjon, 2021). Tanggung jawab PPK juga mencakup pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa untuk memastikan penggunaan anggaran yang akuntabel dan efektif (Mahardhika, 2021).

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan, dibiayai oleh APBN/APBD. Tujuannya mencakup penghematan,^[12] dukungan pada usaha dalam negeri, pemberdayaan usaha mikro, kecil, koperasi, dan industri kreatif, serta pemerataan ekonomi. ^[13] Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola, dimana Pelaksanaan pengadaan melibatkan pihak seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia barang/jasa.

Terlibat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) kata "terlibat" di definisikan sebagai "turut terbawa-bawa (dalam suatu masalah)". Terlibat dalam Bahasa Inggris sama dengan kata "*engage*" yang di definisikan sebagai berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau acara; untuk menarik dan mempertahankan perhatian atau minat seseorang (Merriam-Webster, 2023); untuk berikrar atau berjanji untuk melakukan sesuatu; untuk mengaitkan atau menyambungkan bagian-bagian mekanis (Cambridge Dictionaries Online, 2023).

Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang melibatkan tindakan korupsi, yang dapat mencakup penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan (Waluyo, 2022). Mereka yang terlibat dalam korupsi berusaha untuk mempengaruhi keputusan dan sering terlibat dalam kegiatan penipuan (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022). Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didefinisikan oleh hukum Indonesia, meliputi pelaku (subjek), tindakan melanggar hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan berpotensi merugikan keuangan atau kepentingan umum (Pusat Edukasi Antikorupsi, Mei 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Ibrahim, pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif tidak menutup kemungkinan bagi seorang peneliti hukum yang menggunakan

tipe penelitian hukum normatif untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris untuk kepentingan dan analisis hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian hukum normatif ini kemudian meneliti pula berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris, namun ada di dalam norma seperti sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus (Ibrahim, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2011). Jenis dan sumber data yang dijadikan bahan penelitian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2011). Jenis dan sumber data yang dijadikan bahan penelitian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks pengkajian pertanggungjawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kepolisian Republik Indonesia, aspek hukum memiliki peran sentral. Tanggungjawab pidana PPK untuk kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa tercermin dalam berbagai ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi yang meliputi perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sejalan dengan ini, dalam Pasal 3 Undang-Undang yang sama, tertera bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana.

Aspek pertanggungjawaban hukum administrasi juga relevan dalam kerangka tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur mengenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat yang dapat dikenakan kepada PPK jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi administratif ini diberlakukan sesuai dengan kewenangan Pejabat Pembina

Kepegawaian atau pejabat yang berwenang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aspek hukum perdata, hubungan hukum antara PPK dan penyedia barang/jasa diatur dalam ketentuan-ketentuan perjanjian kontrak. Selain itu, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan prinsip *Pacta Sunt Servanda*, bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang bersangkutan. Dalam hal terjadi perselisihan atau wanprestasi oleh penyedia barang/jasa, mekanisme hukum perdata dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pertanggungjawaban hukum PPK dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa juga berhubungan dengan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam proses pengadaan. Dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Pejabat Pembuat Komitmen harus mematuhi berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait pengawasan dan penggunaan kartu tanda pengenal (KTP) dalam pengadaan barang/jasa. Pertanggungjawaban pidana bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan hal yang penting untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, menurut penulis bahwa dasar dari tanggung jawab pidana adalah prinsip pertanggungjawaban pribadi: tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan atau transaksi yang tidak dilakukannya sendiri atau dengan cara lain tidak terlibat secara pribadi atau dengan cara lain berpartisipasi (*nulla poena sine culpa*) (Van Sliedregt, 2012). Artinya PPK dapat dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab pidana jika terbukti bahwa dia memiliki kesalahan pribadi yang melibatkan unsur kesalahan subjektif, seperti kesadaran akan melanggar hukum atau niat jahat untuk melakukan tindakan melawan hukum. Sehingga membutuhkan bukti kesalahan pribadi untuk menemukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman. Sehingga penulis dapat mengemukakan bahwa adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, hal ini juga sejalan dengan prinsip umum tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (Ridwan, 2014).

Menurut perspektif hukum publik adanya kewenangan PPK yang menimbulkan pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang itu, sejalan dengan prinsip umum yaitu tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Senada dengan pendapat Belinfante yang mengatakan "*niemand kan een bevoegdheid uitoefenen zonder verantwoordig schuldiging te zijn of zonder dat of die uitoefening Controle bestaan*" (terjemahan bebas: tidak seorang pun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan) (Belinfante, 2012). Penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan pada PPK semata, tetapi juga pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat pihak-pihak lain, seperti Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengadaan tersebut. Oleh karena itu, dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, penting bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk PPK, PA, KPA, dan pihak lainnya. Tanggung jawab pidana harus ditentukan berdasarkan bukti adanya kesalahan pribadi yang melibatkan unsur kesalahan subjektif, serta mempertimbangkan tanggung jawab jabatan dan keterlibatan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut.

Selain itu, Perlindungan hukum bagi PPK juga berkaitan dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang efektif dan transparan. Kewenangan yang sah, prosedur yang tepat, dan substansi yang akurat harus menjadi dasar dari setiap tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan, termasuk PPK. Dengan menjalankan tugas sesuai asas-asas penyelenggaraan negara, PPK dapat memastikan perlindungan hukum yang kuat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 77 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengaduan dari masyarakat terhadap masalah dalam pengadaan barang dan jasa perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan melibatkan bukti-bukti yang kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. Pengaduan yang dianggap beralasan akan ditindaklanjuti oleh APIP dan/atau LKPP sesuai dengan kewenangannya. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini tidak selalu diikuti, terutama dalam kasus-kasus yang diindikasikan sebagai potensi kerugian negara atau pelanggaran prosedur.

Praktik pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 seringkali tidak mengikuti prosedur yang diamanatkan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum (APH) langsung memberikan surat panggilan kepada PPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan kerugian negara atau pelanggaran prosedur. Ini berdampak pada rasa kekhawatiran dan keraguan PPK dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam situasi-situasi yang berpotensi menjadi sasaran penyelidikan atau pemeriksaan oleh pihak penegak hukum. Perlu diperhatikan bahwa tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertindak di bawah kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, terbagi atas tugas kedinasan dan tugas pidana. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan pribadi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, sedangkan pertanggungjawaban kedinasan berkaitan dengan kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan. Penetapan atau penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa merupakan dua tugas PPK yang sering menimbulkan masalah, karena terkadang spesifikasi teknis yang dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia

barang/jasa. PPK seharusnya memiliki pelatihan keilmuan yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, namun seringkali karena kurangnya tenaga ahli, PPK dan staf teknisnya tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan persyaratan hukum.

Akibatnya, PPK mungkin tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengendalikan biaya yang membengkak dan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis kontrak. Karena kurangnya pengetahuan, keahlian dan kompetensi di bidangnya, pelaksanaan tugas PPK yang demikian dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau daerah. Terkadang sistem pelaksanaannya sendiri justru melemahkan PPK dalam menjalankan tugasnya. Struktur organisasi pengadaan yang menempatkan PP/ULP, PPK dan PPHP di bawah kewenangan pengguna anggaran (PA/KPA) merupakan salah satu kelemahan dalam mencapai akuntabilitas, karena hal ini menyisakan celah bagi PA/KPA untuk melakukan intervensi jika ingin memanipulasi sistem pengadaan. Selain itu, unsur kompetisi pemasok terkadang hilang dalam e-katalog, karena pejabat pengadaan dapat memilih barang dari katalog elektronik tanpa adanya kompetisi pemasok.

Hal ini membuat PPK sangat rentan terhadap campur tangan pihak luar atau kecurangan yang disengaja. Selain itu, intervensi pimpinan untuk mengatur pemenang lelang membuat penerapan aturan tidak berjalan dengan baik. Demikian pula halnya dengan aturan pengangkatan PPK yang masih berdasarkan formalitas dan preferensi pimpinan. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah menjelaskan hal ini dengan sangat jelas bahwa "PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa." Dominasi intervensi pimpinan yakni pengguna anggaran terhadap PPK, sehingga menimbulkan efek negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban PPK untuk melaksanakan peraturan secara penuh belum terpenuhi. Dalam menghadapi kompleksitas ini, perlindungan hukum bagi PPK memiliki peran sentral. Peraturan Presiden memberikan kerangka perlindungan yang dapat disinkronkan dengan praktik pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, misalnya, menegaskan kewajiban pimpinan untuk memberikan pelayanan hukum dan advokasi kepada pelaku pengadaan, menciptakan perlindungan preventif. Begitu pula dalam Pasal 5 ayat (1) hingga (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, hak-hak PPK dijamin, termasuk dalam aspek penyelesaian sengketa. Dalam kerangka pelaksanaan pengadaan atau kontrak pemerintah, di mana terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur prosesnya, upaya pencegahan permasalahan hukum dapat diimplementasikan melalui penggunaan peraturan yang jelas dan lengkap. Namun, dalam situasi di mana penerapan peraturan tersebut sulit atau tidak memungkinkan, penggunaan diskresi dapat menjadi solusi. Meskipun demikian, dalam pengambilan keputusan diskresi, penting untuk berkonsultasi dengan instansi terkait seperti APIP, BPKP, atau LKPP untuk memastikan bahwa langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dan regulasi yang berlaku.

KESIMPULAN

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 memberikan wewenang kepada PPK untuk keputusan yang berpengaruh pada anggaran negara, sekaligus melarang tegas praktik suap sesuai Pasal 7 huruf f. Namun, Pasal 52 Ayat (2) dan Surat Edaran LKPP No. 8 Tahun 2020 mengatur batasan kewenangan PPK. PPK bertanggungjawab dalam aspek hukum administrasi dan perdata terkait pengadaan, namun inti pertanggungjawaban pidananya terletak pada pelanggaran hukum pengadaan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau kolektif, merugikan negara. Seluruh pelaku, termasuk Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana PPK berfokus pada kesalahan individu, kesalahan subjektif, serta peran pihak lain dalam pengadaan. Dalam paradigma perlindungan hukum terhadap tanggung jawab pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, prinsip-prinsip perlindungan hukum terungkap dengan esensialitasnya baik dalam dimensi preventif maupun represif. Prinsip konstitusional Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak asasi manusia dan membangun negara

berdasarkan hukum menjadi pijakan kuat. PPK, sebagai pengelola transaksi administratif yang utama, memainkan peran signifikan dalam mengelola kontrak pengadaan dengan memahami batasan-batasan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pendekatan preventif tercermin dalam upaya mitigasi risiko melalui konsultasi hukum serta penerapan pedoman yang transparan. Di sisi lain, pendekatan represif tampak melalui pendampingan hukum dan pertimbangan alternatif penyelesaian sengketa (APS) saat sengketa muncul. Meski demikian, keberhasilan pengaduan masyarakat sebagai titik awal sesuai Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memerlukan implementasi yang kokoh. Perlindungan hukum juga termanifestasi dalam hukum ASN yang terkait. Keseluruhannya, prinsip-prinsip ini menciptakan dasar kokoh bagi PPK dalam melaksanakan tugasnya dengan integritas, patuh pada peraturan, serta menerapkan tata kelola yang efektif dan akuntabel. Diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, bahwa perlindungan hukum menjelma sebagai penuntun preventif dan mekanisme resolusi dalam menjaga integritas dan transparansi dalam konteks pengadaan.

REFERENSI

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Arti kata tanggung jawab*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tersedia pada: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia "terlibat."* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses pada: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terlibat>
- Belinfante, A. D., et al. (2012). *Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Belanda*. (Edisi ke-17). Deventer: Kluwer.
- Cambridge Dictionaries Online. (2023). *Engage*. Cambridge University Press & Assessment. Diakses pada: <https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/engage>
- Hadjon, P. M., Djarmiaty, T. S., Addink, G. H., ten Berge, J. B. J. M., & University Press, G. M. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ibrahim, J. (2010). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Istiqlallia, N. F., Ardelia, R., & Ramadhanti, P. (2020). "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Perspektif*, 25(2).
- Kukuh Galang Waluyo. (November 2022). *Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tersedia pada: <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1).
- Merriam-Webster. (2023). *Engage*. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. Diakses pada <https://www.merriam-webster.com/dictionary/engage>
- Metasari, Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1).
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2020). *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (Mei 2022). *Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Tersedia pada: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suratman, Hayat, & Salamah, U. (2019). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Van Sliedregt, E. (2012). The curious case of international criminal liability. *Journal of International Criminal Justice*, 10(5), 1171-1188.
- Wana Alamsyah. (Tahun 2020). *Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020*. Indonesian Corruption Watch. Tersedia pada <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/210101-Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202020.pdf>